

The Manager Review

Jurnal Ilmiah Manajemen

Analisis Kinerja Pelayanan Subbagian Pendidikan Dan Subbagian Kemahasiswaan Di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu

**Krisnadi
Syaiful Anwar
Sugeng Susetyo**

Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Polres Seluma Polda Bengkulu

**Indras Budi Purnomo
Darmansyah
Sugeng Susetyo**

Analisis Pengaruh Iklim Organisasi Dan Promosi Jabatan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pt Bank Bengkulu Cabang Utama

**Tri Febrina Melinda
Kamaludin
Nasution**

Analisis Organisasi Pembelajar (*Learning Organization*) Dan Budaya Organisasi Di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu

**Irwan Safari
Sigit Nugroho
Praningrum**

Pengaruh Motivasi, Kepuasan Kerja Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bio Nusantara Teknologi Bengkulu

**Nurzam
Fahrudin JS Pareke
Praningrum**

Sistem Penyampaian Jasa Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Curup

**Glamoria Berti Yusenti
Lizar Alfansi
Ferry Tema Atmaja**

**Analisis Efektivitas Penggunaan Modal Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Rentabilitas Ekonomi
(Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Guru SD Kabupaten Kepahiang)**

**Herry Novrianda
Kamaludin
Paulus S Kananlua**

Analisis Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Dan Kecerdasan Spiritual Karyawan PT. Adhi Karya Jakarta

**Juanda
Syaiful Anwar AB
Praningrum**

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian

**Rinaldy
Kamaludin
Sri Adji Prabawa**

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Motivasi Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu

**Marleni
Handoko Hadiyanto
Trisna Murni**

Analisis Perilaku Pengguna *Mobile Banking* Di Bri Cabang Bengkulu Dengan Pendekatan Utaut (*Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*)

**Nurmuyasarah
Effed Darta Hadi
Muhartini Salim**



The Manager Review

Jurnal Ilmiah Manajemen

Penanggungjawab : Prof. Lizar Alfansi, SE., MBA., Ph.D.

Ketua Dewan Redaksi : Dr. Slamet Widodo, MS

Sekretaris Dewan Redaksi : Sugeng Susetyo, S.E., M.Si

Dewan Redaksi:

1. Prof. Dr. Firmansyah
2. Prof. Dr. Darwin Sitompul
3. Prof. Dr. Yasri
4. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc., Ak.
5. Dr. Fahrudin Js Pareke, S.E., M.Si.
6. Dr. Effed Darta Hadi, S.E., M.B.A.
7. Dr. Willy Abdillah, S.E., M.Sc

Staf Pelaksana:

1. Berto Usman, S.E., M.Sc.
2. Karona Cahya Susena, S.E., M.M.

**SEMUA TULISAN YANG ADA DALAM JURNAL PENELITIAN BUKAN MERUPAKAN
CERMINAN SIKAP DAN ATAU PENDAPAT DEWAN REDAKSI
TANGGUNGJAWAB TERHADAP ISI DAN ATAU AKIBAT DARI TULISAN TETAP
TERLETAK PADA PENULIS**

Alamat Redaksi

**Program Pascasarjana Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu
Jl. W.R Supratman, Kandang Limun Bengkulu
Telpon 0736-21170**

Ana
Ken
Kri
Sya
Sug

Imp
Pen
Selu
Indr
Dara
Suge

Ana
Kep
Tri
Kam
Nasu

Ana
Org
Irw
Sigit
Pran

Peng
Kary
Nurza
Fahru
Pran

Sister
Curu
Glam
Lizar
Ferry

The Manager Review

Jurnal Ilmiah Manajemen



Volume 13, Nomor 1, April 2013

DAFTAR ISI

Analisis Kinerja Pelayanan Subbagian Pendidikan Dan Subbagian Kemahasiswaan Di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu <i>Krisnadi</i> <i>Syaiful Anwar</i> <i>Sugeng Susetyo</i>	1 - 15
Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Di Lingkungan Polres Seluma Polda Bengkulu <i>Indras Budi Purnomo</i> <i>Darmansyah</i> <i>Sugeng Susetyo</i>	16 - 27
Analisis Pengaruh Iklim Organisasi Dan Promosi Jabatan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pt Bank Bengkulu Cabang Utama <i>Tri Febrina Melinda</i> <i>Kamaludin</i> <i>Nasution</i>	28 - 36
Analisis Organisasi Pembelajar (<i>Learning Organization</i>) Dan Budaya Organisasi Di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bengkulu <i>Irwan Safari</i> <i>Sigit Nugroho</i> <i>Praningrum</i>	37 - 44
Pengaruh Motivasi, Kepuasan Kerja Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bio Nusantara Teknologi Bengkulu <i>Nurzam</i> <i>Fahrudin JS Parcke</i> <i>Praningrum</i>	45 - 59
Sistem Penyampaian Jasa Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Curup <i>Glamoria Berti Yusenti</i> <i>Lizar Alfansi</i> <i>Ferry Tema Atmaja</i>	60 - 73

DAFTAR ISI

Analisis Efektivitas Penggunaan Modal Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Rentabilitas Ekonomi (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Guru SD Kabupaten Kepahiang) <i>Herry Novrianda</i> <i>Kamaludin</i> <i>Paulus S Kananlua</i>	74 - 83
Analisis Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Dan Kecerdasan Spiritual Karyawan PT. Adhi Karya Jakarta <i>Juanda</i> <i>Syaiful Anwar AB</i> <i>Praningrum</i>	84 - 97
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian <i>Rinaldy</i> <i>Kamaludin</i> <i>Sri Adji Prabawa</i>	98 - 106
Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Motivasi Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu <i>Marleni</i> <i>Handoko Hadiyanto</i> <i>Trisna Murni</i>	107 - 115
Analisis Perilaku Pengguna Mobile Banking Di Bri Cabang Bengkulu Dengan Pendekatan Utaut (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) <i>Nurmuyasarah</i> <i>Effed Darti Hadi</i> <i>Muhartini Salim</i>	116 - 127
Analisa Penilaian Performansi Bulanan (P2B) Karyawan PT. Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Cabang Bengkulu <i>Muhammad Idil Fitriyah</i> <i>Darmansyah</i> <i>Sugeng Susetyo</i>	128 - 142

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR SEBELUM DAN SESUDAH MEMPEROLEH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN

Oleh:

Rinaldy ¹⁾

Kamaludin²⁾ Sri Adji Prabawa³⁾

Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Manajemen

Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu

Jalan W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A

ABSTRACT

The objectives of this research is to find out the difference on the financial performance regency government of Kaur before and after obtain unqualified opinion in terms of regional financial independence, regional income effectivity, regional income efficiency and regional income growth. This research was using secondary data which was the audited financial statements of regency government from year 2007 until 2011. Kaur regency financial performance was measured with the financial ratio then compared with performance indicators. The result of the study shows that the regional financial independent ratio, regional income effectivity ratio, and regional income growth of Kaur regency financial performance before and after obtain unqualified opinion has not shown valuable improvement.

Keywords: Financial performance, unqualified opinion, regional financial independence, regional income effectivity, regional income efficiency and regional income growth

PENDAHULUAN

Opini adalah pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas Sistem Pengendalian Interen. Opini WTP adalah opini tertinggi yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Pencapaian opini WTP pada laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dari pemerintah daerah tersebut dilakukan dengan baik dan terbebas dari salah saji yang material. Perkembangan WTP berdasarkan Hapsem BPK tahun 2010 menunjukkan bahwa dari 524 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hanya 34 LKPD yang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau (7%), perolehan opini WTP tersebut sudah meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya diperoleh 15 LKPD dari 524 LKPD (3%). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah khususnya dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah oleh pemerintah daerah. Perbaikan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sangat penting untuk ditingkatkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Kemandirian daerah secara umum diukur dari Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Kemandirian daerah juga menggambarkan keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dengan menggali potensi-potensi yang ada di daerah tersebut dan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah harus mampu menggali, dan mendayagunakan potensi pendapatan daerah secara efektif dan efisien.

Kabupaten Kaur telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian sebanyak dua (3) kali yaitu untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009, 2010 dan 2011, namun realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 tidak konsisten mengalami peningkatan bahkan cenderung naik dan turun. Hal ini berbeda dengan realisasi penerimaan pendapatan daerah yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Realisasi PAD dan Penerimaan Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan Daerah
2007	5.966.083.373,79	253.711.168.528,79
2008	5.753.452.806,11	281.927.136.088,12
2009	9.012.332.810,80	293.018.794.929,45
2010	6.046.143.975,79	316.148.803.900,25
2011	6.810.591.506,25	365.412.752.616,15

Sumber : DPPKAD Kaur, data yang diolah, 2012

Suatu Kabupaten yang memperoleh Opini WTP seharusnya ada perbaikan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengelolaan keuangan itu bermula dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur sebelum dan sesudah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dalam hal kemandirian keuangan, efektifitas PAD, efisiensi PAD dan pertumbuhan PAD?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pemeriksaan

Pengertian pemeriksaan menurut Arens dan Loebbecke (Arens & Loebbecke, 1997) adalah

"the accumulation and evaluation of evidence about information to determine on report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person".

Pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 ayat 1 adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan,

kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sehubungan dengan diterapkannya anggaran kinerja, pengukuran kinerja menjadi semakin penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menilai tingkat akuntabilitas instansi Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas (Mustafa dan Halim, 2009). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 37 pengertian kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Kinerja keuangan pemerintahan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. (Azhar, 2008).

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Menurut Halim dalam Wahyuni (2010) terdapat beberapa analisa rasio didalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total penerimaan daerah.

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \quad (2.1)$$

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana yang berasal dari luar. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak luar (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

2. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Ulum (2009), Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektifitasnya maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \quad (2.2)$$

3. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Ulum, 2009). Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output yang sebesar-besarnya (*spending well*) Arsana & Dicriyani (2012). Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatannya yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik.

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \quad (2.3)$$

4. Rasio Pertumbuhan PAD

Menurut Ekawarna, Sam dan Rahayu (2009), Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan PAD menunjukkan bahwa PAD yang diterima oleh pemerintah daerah mengalami peningkatan. Rasio pertumbuhan dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD Xn} - \text{Realisasi PAD Xn-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD Xn-1}} \quad (2.4)$$

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dilakukan berupa deskriptif salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk mengetahui atau untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2009). Penelitian akan dilakukan dengan cara melakukan analisis atas laporan keuangan Kabupaten Kaur *audited*. Laporan yang diperbandingkan adalah laporan keuangan sejak tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2011.

Pemda Kaur memperoleh Opini WTP pertama pada laporan keuangan tahun anggaran 2009 dan berlanjut sampai dengan tahun anggaran 2011. Dari laporan keuangan Kabupaten Kaur ini diambil beberapa rasio yang dianggap cukup memadai dalam menilai kinerja keuangan Kabupaten Kaur tersebut. Rasio inilah yang dijadikan sebagai alat ukur kinerja keuangan dan diperbandingkan guna mendapatkan hasil apakah terdapat perbedaan kinerja sebelum dan sesudah memperoleh opini WTP dari BPK. Setelah menghitung kinerja dengan rasio-rasio tersebut kemudian membandingkannya dengan indikator-indikator rasio. Indikator tersebut akan menentukan apakah analisis kinerja pemerintah daerah sebelum dan setelah memperoleh opini WTP berbeda atau tidak

HASIL PENELITIAN

Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten Kaur

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.
Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007-2011

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan Daerah	Rasio(%)	Keterangan
	A	b	c = a/b	D
2007	5.966.083.373,79	253.711.168.528,79	2,35	Rendah Sekali
2008	5.753.452.806,11	281.927.136.088,12	2,04	Rendah Sekali
2009	9.012.332.810,80	293.018.794.929,45	3,08	Rendah Sekali
2010	6.046.143.975,79	316.148.803.900,25	1,91	Rendah Sekali
2011	6.810.591.506,25	365.412.752.616,15	1,86	Rendah Sekali

Sumber : DPPKAD Kaur, data yang diolah, 2012

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Kaur masih rendah sekali. Rata-rata kemandirian keuangan daerah dari tahun 2007 sampai dengan 2011 sebesar 2,25%. Rasio kemandirian tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 3,08%. Sedangkan rasio kemandirian terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 1,86%. Hal ini disebabkan pendapatan yang diterima oleh Pemda Kaur yang berasal dari Dana Perimbangan yang semakin besar dari tahun ke tahun tidak diimbangi dengan kontribusi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah.

Tingkat kemandirian PAD Pemerintah Kabupaten Kaur sebelum memperoleh opini WTP yaitu sebelum tahun 2009 lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat kemandirian setelah memperoleh opini WTP. Sebelum memperoleh opini WTP rata-rata tingkat kemandirian sebesar 2,20%, sedangkan setelah memperoleh opini WTP tingkat kemandirian PAD sebesar 1,89% atau turun 0,31%. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah memperoleh opini WTP tingkat kemandirian PAD Kabupaten Kaur tidak mengalami perbaikan bahkan penurunan. Tingkat kemandirian keuangan Pemda Kaur setelah memperoleh opini WTP, yaitu Tahun 2010 sampai dengan 2011 berada pada range 0-25% sehingga tingkat kemandirian keuangan Pemda Kaur masih rendah sekali.

Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur

Hasil perhitungan rasio efektifitas PAD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.
Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007-2011

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran PAD	Rasio (%)	Keterangan
	A	B	c = a/b	d
2007	5.966.083.373,79	3.791.280.200,00	157,36	Sangat efektif
2008	5.753.452.806,11	5.072.500.000,00	113,42	Sangat efektif
2009	9.012.332.810,80	7.624.862.965,88	118,20	Sangat efektif
2010	6.046.143.975,79	11.000.945.000,00	54,96	Tidak efektif
2011	6.810.591.506,25	8.796.237.030,28	77,43	Kurang efektif

Sumber : DPPKAD Kaur, data yang diolah, 2012

Berdasarkan Tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa rasio efektifitas PAD pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 sangat efektif karena rasio efektifitas lebih dari 100%, namun pada tahun

2010 tidak efektif dan tahun 2011 kurang efektif, karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ditetapkan kurang dari 100%. Kurang efektif ini salah satunya dapat disebabkan oleh anggaran PAD yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga melebihi realisasi PAD pada tahun tersebut. Rata-rata rasio efektifitas selama tahun 2007 sampai dengan 2011 adalah 104,27%. Rasio efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 157,36%. Sedangkan rasio efektifitas terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 54,96%.

Efektifitas PAD sebelum Kabupaten Kaur memperoleh Opini WTP yaitu sebelum tahun 2009 rata-rata sebesar 135,39%, sedangkan efektifitas PAD setelah memperoleh opini WTP adalah sebesar 66,19% atau turun 69,2%. Efektifitas PAD pada tahun 2007 sampai dengan 2009 diatas 100% sehingga dapat dikatakan sangat efektif. Efektifitas PAD pada tahun 2010 mengalami penurunan atau 54,96% yang berada pada *range* kurang dari 60% sehingga dikatakan tidak efektif.

Pada tahun 2011 Efektifitas PAD meningkat menjadi 77,43% atau berada pada *range* 60%-80%, sehingga efektifitas PAD dapat dikatakan kurang efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Kaur dalam hal efektifitas PAD antara sebelum dan sesudah memperoleh opini WTP tidak mengalami perbaikan. Salah satu penyebab efektifitas PAD pada tahun 2010 tidak efektif dikarenakan anggaran PAD lebih besar dari pada realisasi PAD pada tahun 2010.

Komponen pendapatan pada tahun 2010 untuk realisasi pajak hiburan, retribusi pemakaian lapangan tenis dan retribusi izin usaha perikanan dan izin usaha perahu motor ikan tidak ada atau Rp0. Penerimaan lain-lain pada Tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp2.348.542.993,64, dari tahun 2009. Penerimaan dari jasa giro pada tahun 2010 juga mengalami penurunan sebesar Rp227.402.594,00 dari tahun 2009.

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur

Hasil perhitungan rasio efisiensi PAD dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4.
Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007-2011

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Biaya Pemungutan	Rasio (%)	Keterangan
	a	B	c = b/a	d
2007	5.966.083.373,79	521.774.207,00	8,75	Sangat efisien
2008	5.753.452.806,11	493.034.648,00	8,57	Sangat efisien
2009	9.012.332.810,80	506.358.247,06	5,62	Sangat efisien
2010	6.046.143.975,79	499.942.282,00	8,27	Sangat efisien
2011	6.810.591.506,25	530.255.527,00	7,79	Sangat efisien

Sumber : DPPKAD Kaur, data yang diolah, 2012

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa rasio efisiensi PAD pada Kabupaten Kaur dari tahun 2007 sampai dengan 2011 sangat efisien. Besarnya biaya pemungutan PAD yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan pemasukan PAD yang diterima. Tingkat efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 5,62%, sedangkan tingkat efisiensi terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 8,75%. Rata-rata tingkat efisiensi PAD dari tahun 2007 hingga 2011 adalah 7,80 %.

Efisiensi PAD sebelum Kabupaten Kaur memperoleh Opini WTP yaitu sebelum tahun 2009 rata-rata sebesar 8,66%, sedangkan tingkat efisiensi setelah memperoleh Opini WTP adalah sebesar 8,03% atau turun 0,63%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah dalam hal

efisiensi PAD antara sebelum dan sesudah memperoleh opini WTP mengalami sedikit perbaikan. Secara keseluruhan tingkat efisiensi PAD dari tahun 2007 sampai dengan 2011 telah cukup baik hal ini dapat dilihat dari tingkat efisiensi PAD yang berada pada *range* kurang dari 60% sehingga dapat dikatakan sangat efisien

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan PAD dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5.
Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007-2011

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Rasio $b = (rn - rn-1) / rn-1$	Keterangan
	A	1	c
2006	2.737.701.133,00		
2007	5.966.083.373,79	1,18	<i>sangat kurang</i>
2008	5.753.452.806,11	-0,04	<i>sangat kurang</i>
2009	9.012.332.810,80	0,57	<i>sangat kurang</i>
2010	6.046.143.975,79	-0,33	<i>sangat kurang</i>
2011	6.810.591.506,25	0,13	<i>sangat kurang</i>

Sumber : DPPKAD Kaur, data yang diolah, 2012

Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan PAD pada Kabupaten Kaur masih sangat kurang dengan rata-rata pertumbuhan dari tahun 2007 sampai dengan 2011 sebesar 0,30%. Pertumbuhan PAD tertinggi pada tahun 2007 dengan tingkat pertumbuhan positif sebesar 1,18% dan terendah pada tahun 2008 dengan tingkat pertumbuhan negatif sebesar 0,04%. Tingkat pertumbuhan PAD sebelum Kabupaten Kaur memperoleh Opini WTP yaitu sebelum tahun 2009 rata-rata sebesar 0,57%, sedangkan rata-rata tingkat pertumbuhan PAD setelah memperoleh opini WTP adalah sebesar negatif 0,10 atau mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah dalam hal pertumbuhan PAD antara sebelum dan sesudah memperoleh opini WTP tidak mengalami perbaikan. Tingkat pertumbuhan PAD dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 fluktuatif.

KESIMPULAN

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan guna meningkatkan kinerja keuangan pada Kabupaten Kaur, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Terkait Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur harus mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah, terutama untuk penerimaan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat, salah satunya dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Upaya yang dapat dilakukan adalah:
 - a. Meningkatkan pengetahuan tentang pajak dan retribusi daerah (sosialisasi), dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
 - b. Mempermudah urusan dalam organisasi dan mekanisme kontrol yang lebih baik. Sehingga tercapainya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan kepada pemakai jasa.
 - c. Meningkatkan mutu pelayanan, dengan menyederhanakan prosedur pembayaran pajak dan retribusi daerah, tempat pembayaran yang lebih mudah untuk dicapai, melengkapi sarana dan prasarana yang cukup baik dengan berbagai kenyamanan pada lokasi pembayaran pajak dan retribusi daerah.

- d. Memperluas dan menambah sumber-sumber penerimaan baru serta mengaktifkan, mengembangkan, menggali sumber-sumber penerimaan yang ada.
- e. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.
- 2 Untuk meningkatkan Efektifitas PAD Pemerintah Kabupaten Kaur dapat menempuh cara-cara sebagai berikut:
 - a. Melakukan pendataan ulang secara tepat dan akurat mengenai basis pungutan, jumlah obyek pungutan, koordinasi dengan instansi terkait yang memiliki objek sumber-sumber pendapatan asli daerah.
 - b. Menyesuaikan tarif setiap objek perlu kiranya dilakukan peninjauan terhadap Peraturan Daerah (PERDA) minimal lima tahun sekali guna menyesuaikan adanya perubahan-perubahan yang mungkin berdampak.
 - c. Dalam penyusunan target atau anggaran penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat disesuaikan dengan potensi yang ada, maka perlu kiranya diadakan survey potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- 3 Untuk lebih meningkatkan efisiensi PAD pemerintah kabupaten dapat menekan biaya-biaya operasional perjalanan dinas untuk penyuluhan pajak dan retribusi daerah. Pemkab melalui DPPKAD atau KPTSP (kantor pelayanan terpadu satu pintu) dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak dan retribusi daerah dengan memberikan kesadaran, himbuan kepada masyarakat agar membayar pajak dan retribusi daerah melalui papan reklame, pamflet, spanduk, iklan dan sebagainya.
- 4 Untuk meningkatkan pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Kaur dapat menempuh cara-cara sebagai berikut:
 - a. Secara berkala melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pemungutan PAD. Agar dapat diketahui apakah terdapat potensi PAD yang hilang, kebocoran-kebocoran sumber penerimaan atas ulah oknum yang tidak bertanggungjawab, evaluasi atas pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang masih dirasa kurang dan lain sebagainya.
 - b. Lebih meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD seperti memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, meningkatkan mutu pelayanan, dengan menyederhanakan prosedur pembayaran pajak dan retribusi daerah seperti membayar retribusi secara *online*, tempat pembayaran yang lebih mudah untuk dicapai, melengkapi sarana dan prasarana yang cukup baik dengan berbagai kenyamanan pada lokasi pembayaran pajak dan retribusi daerah, memperluas dan menambah sumber-sumber penerimaan baru serta mengaktifkan, mengembangkan, menggali sumber-sumber penerimaan yang ada serta melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Karya Satya. (2008). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum Dan Setelah Otonomi Daerah*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Arsana, I Made Marsa, & Dicriyani, Ni Luh Gede Mahayu. (2012). "Value for money audit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sektor Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan)". *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi STIE Triatma Mulya*, Vol 17, No. 2 Edisi Desember 2012.
- Arens., & Loebbecke. (1997). *Auditing Buku Satu*. Hal.2. Salemba Empat. Prentice-Hall. Jakarta.

Ekawarna, Shita., Sam, Iskandar., & Rahayu, Sri. (2009). "Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi". *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, Volume I, No. 1 Februari 2009.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, Nomor 600.900-327, (1996).

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Hal.121-122. Andi Yogyakarta.

Mustafa, Bob., & Halim, Abdul. (2009). "Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat". *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol 7, No.4 Nopember 2009.

Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Nomor 58 (2005).

Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Nomor 24, (2005).

Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Nomor 71, (2010).

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Nomor 13, (2006).

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Nomor 21, (2011).

Sekaran, Uma. (2009). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Hal.158. Salemba Empat. Jakarta.

Sularso, Havid., & Restianto, Yanuar. (2011). "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah". *Jurnal Media Riset Akuntansi*, Vol.1 No.2 Agustus 2011.

Ulum, Ihyaul. (2009). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Hal.31-33. Bumi Aksara. Jakarta

Undang-undang tentang Pemerintah Daerah, Nomor 22 (1999).

Undang-undang tentang Pemerintah Daerah, Nomor 32 (2004).

Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Nomor 25 (1999).

Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Nomor 33 (2004).

Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Nomor 15 (2004).

Wahyuni, Nanik. (2010). " Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang". *Jurnal El-Muhasaba*, Vol.1 No.1 Januari 2010.